

TINDAK LANJUT RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS INSPEKTORAT TAHUN 2021

No.	Kegiatan	Output	Proses	Keterangan	Tindak Lanjut
1	Gratifikasi	1 Penyempurnaan Pengelolaan Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	1 Penyempurnaan Kebijakan Gratifikasi	Menerbitkan SE No 29 Tahun 2020 ttg Pelaporan gratifikasi secara elektronik sebagai penyesuaian di masa pandemi Covid 19	akan disesuaikan dengan peraturan KPK
			2 Menyebarkan/diseminasi media sosialisasi pesan Anti Gratifikasi	<i>on Progress</i>	akan terus dilakukan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
			3 Melakukan Sosialisasi Gratifikasi secara mandiri Oleh UPG	telah dilaksanakan melalui penyebaran media sosialisasi anti gratifikasi dalam berbagai kegiatan yg diinisiasi oleh Inspektorat contohnya pada kegiatan BimTek Manajemen Risiko pada bulan Juli 2021	
1	Gratifikasi	1 Penyempurnaan Pengelolaan Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	4 Melakukan Identifikasi titik rawan praktik gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Sept - Des 2021	
			5 Perbaiki Pedoman Gratifikasi dan Perbaikan Sistem Gratifikasi	Sept -Des 2021	
			6 Melibatkan stakeholder dalam implementasi pengendalian gratifikasi	Sudah dilaksanakan dengan mengirimkan surat ttg Mahkamah Konstitusi tidak menerima gratifikasi kepada para stake holder	Akan dilaksanakan secara berkala
1	Gratifikasi	2 Meningkatkan Kompetensi Tim UPG di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	1 Mengikuti <i>e-learning</i> gratifikasi dari KPK	sudah terlaksana, Auditor MK telah mengikuti <i>e- Learning</i> UPG Development Program dari KPK pada Bulan April 2021	
			2 Mengikuti/menginisiasi Bimbingan Teknis terkait implementasi PPG	sudah dilaksanakan melalui sosialisasi Gratifikasi, BK, Dumas dan WBS bagi dalam rangka Pembangunan ZI, pada bulan Juni 2021	

		3	Pengelolaan Pelaporan Gratifikasi oleh UPG di Mahkamah Konstitusi	1	Laporan Pengelolaan Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi	sudah terlaksana dalam bentuk laporan Triwulan Pelaporan Gratifikasi	
2	Pelaksanaan SPIP	1	Penyempurnaan Pelaksanaan SPIP	1	Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pembina (BPKP) dalam persiapan pelaksanaan SPIP terintegrasi	Sept-Des 2021	
				2	Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pembina (BPKP) dalam persiapan pelaksanaan CACM	sudah dilaksanakan melalui rakor dengan Team BPKP pada bulan Juni 2021	
				3	Melakukan Sosialisasi SPIP terintegrasi kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	akan dilaksanakan pada 2022	
2	Pelaksanaan SPIP	2	Penyempurnaan Manajemen Risiko	1	Melakukan Monev profil risiko unit kerja	Monev Semester I dilakukan pada bulan Juli 2021	
				2	Membentuk <i>Risk Officer</i> pada unit kerja	Di tunjuk melalui SK Sekjen No 165 Tahun 2021 ttg <i>Risk Officer</i> Manajemen Risiko Pada Unit Kerja	
				3	Melaksanakan Bimtek Manajemen Risiko Bagi <i>Risk Officer</i> Tahun 2021	Bimtek dilaksanakan pada bulan Juli 2021	
		3	Penguatan Profesionalisme APIP	1	Mengikutsertakan APIP dalam Bimtek SPIP terintegrasi yang di selenggarakan BPKP	4 orang Auditor telah mengikuti Bimtek SPIP terintegrasi dari BPKP sejak Mart - Juli 2021	di rencanakan seluruh APIP akan diusulkan mengikuti Bimtek SPIP terintegrasi
				2	Mengusulkan sertifikasi profesi bagi APIP	1 Orang auditor mengikuti sertifikasi audit forensik pada bulan Juli 2021	akan diusulkan sertifikasi keahlian Manajemen Risiko pada pimpinan
3	Pengaduan Masyarakat	1	Penyempurnaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1	Melakukan Sosialisasi terkait Pengaduan Masyarakat	sudah dilaksanakan melalui sosialisasi Gratifikasi, BK, Dumas dan WBS bagi dalam rangka Pembangunan ZI, pada bulan Juni 2021	Akan terus dilakukan dalam berbagai kegiatan MK
				2	Melakukan pembaharuan data wajib lapor serta perbaikan format database LHKPN MK	sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2021	
				3	Penyusunan SOP tentang Pengelolaan LHKPN MK	Sept - Des 2021	
				4	Berkolaborasi dengan Menpan dalam pengelolaan Dumas Melalui aplikasi SPAN LAPOR	sudah dilaksanakan	akan dilakukan monev atas pengelolaan Dumas
		2	Pelaporan Pengaduan Masyarakat	1	Menerbitkan laporan Monev secara berkala setiap Triwulan	sudah dilaksanakan setiap Triwulan	

4	Whistle Blowing System	1	Penyempurnaan Pengelolaan WBS	1	Melakukan Diseminasi Konten terkait Whistle Blowing System	sudah dilaksanakan dengan menyebarkan media sosialisasi berupa video 'Ayo Lapor' kepada seluruh pegawai di Lingkungan MK melalui <i>Wa blast</i>	Video "Ayo Lapor" akan di sebarakan secara berkala kepada pegawai melalui berbagai media
				2	Memperbaiki Pedoman Penanganan WBS	Sept - Des 2021	
				3	Memperbaiki fitur Aplikasi WBS, khususnya perbaikan kerahasiaan pelapor	Sept - Des 2021	
				4	Menyusun Mekanisme Pelaporan/Pengaduan Untuk Pimpinan tertinggi	Sept - Des 2021	Melakukan Studi Tiru ke Instansi lain yang sudah mempunyai mekanisme hal tersebut
		2	Pelaporan Pengaduan Masyarakat	1	Menerbitkan laporan Monev secara berkala setiap Triwulan	sudah dilaksanakan setiap Triwulan	
5	Penanganan Benturan Kepentingan	1	Penyempurnaan Pengelolaan Benturan Kepentingan	1	Koordinasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan dengan Stake Holder	Sudah dilaksanakan melalui Rakor dengan KPK	
				2	Sosialisasi Benturan Kepentingan	sudah dilaksanakan melalui sosialisasi Gratifikasi, BK, Dumas dan WBS bagi dalam rangka Pembangunan ZI, pada bulan Juni 2021	
				3	Koordinasi dengan KeMenpanrb terkait dengan proses pemetaan benturan kepentingan	Okt - Des 2021	
				4	Pemetaan Benturan Kepentingan pada unit kerja	Okt - Des 2021	
				5	Penyusunan Format laporan Benturan Kepentingan pada unit kerja	Okt - Des 2021	
		2	Pelaporan Benturan Kepentingan	1	Menerbitkan laporan Monev secara berkala setiap Triwulan	Sudah dilaksanakan setiap triwulan	
6	Pembangunan ZI	1	Pengajuan Predikat WBK/WBBM	1	Menyiapkan Usulan Unit Kerja Calon WBK/WBBM	SK Sekjen No 191 Tahun 2021 ttg Penetapan Unit Kerja Calon WBK/WBBM	
				2	Membentuk Tim Penilai Internal	SK Sekjen No 104 Tahun 2021 ttg TPI	
				3	Melakukan Pendampingan terhadap Unit Kerja Calon WBK/WBBM dalam Menyiapkan Usulan Predikat WBK/WBBM	ST No 185/2900/2021 Pendampingan dan Konsultasi Persiapan Pengajuan Predikat WBK/WBBM mulai Juni s.d Des 2021	

			4	Melakukan <i>Self Assesment</i> terhadap Unit Kerja Calon WBK/WBBM	<i>Self Assesment</i> dilakukan pada bulan Juni s.d Juli 2021		
			5	Mengusulkan Unit Kerja terpilih untuk mendapat predikat WBK/WBBM kepada TPN melalui PMPZI	Telah diajukan melalui aplikasi PMPZI pada bulan Juli 2021		
6	Pembangunan ZI	2	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan ZI	1	Melakukan Sosialisasi ZI kepada seluruh pegawai di Lingkungan Kepaniteraan MK	Sudah dilaksanakan kepada pegawai pada unit kerja calon WBK/WBBM pada bulan Februari 2021	Koordinasi dengan Biro Humas untuk membuat konten sosialisasi melalui media digital
				2	Pemberian Reward terhadap Unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM	<i>on Progress</i>	
				3	Bekerjasama dengan Unit lain untuk peningkatan pelayanan prima di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Akan dilaksanakan pada semester II	
7	APIP	1	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas APIP	1	Mengajukan permohonan sertifikasi auditor di Inspektorat kepada pimpinan	Usulan Sertifikasi telah disetujui pimpinan	Menyiapkan Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko yang akan dilaksanakan pada bulan Sept 2021
				2	Pengusulan Diklat Teknis/Substansi bagi APIP	Sudah dilaksanakan	mengusulkan kembali APIP secara bergantian
				3	<i>In House Training</i> Penguatan Kapasitas dan Kompetensi APIP	Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko (CRMO) akan dilaksanakan pada 9/1/2021	